



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Bisnis Jalan Tol mendapat momentum
Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 7

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pemerintah dalam mengusahakan pencapaian target 1.000 kilometer jalan tol hingga 2019. Tahun ini sekaligus menjadi bukti mengapa jalan tol kerap dianggap sebagai salah satu sektor infrastruktur yang paling progresif baik dalam hal pelaksanaan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun dalam hal konstruksi. Bagaimana tidak? Tahun ini pemerintah tercatat telah mengoperasikan 11 ruas tol baru. Pencapaian yang patut diapresiasi, bila mengingat 2 tahun terakhir yaitu pada 2015 dan 2016, hanya ada enam ruas tol baru yang beroperasi, masing-masing tiga ruas baru setiap tahunnya. Peningkatan jumlah ruas tol yang dapat dioperasikan itu didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, proses pengadaan lahan yang relatif lebih cepat dari tahun lalu akibat mekanisme dana talangan lahan yang mulai berjalan efektif. Kedua, dorongan dari Kepala Negara dan pejabat terkait seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang rajin meninjau proyek-proyek yang dikerjakan, membuat kontraktor terpacu untuk bekerja lebih cepat. Di samping mengoperasikan ruas tol baru, pemerintah pada tahun ini juga melelang sejumlah ruas tol prakarsa, seperti Jakarta—Cikampek II Layang dan Jakarta—Cikampek II Selatan, Probolinggo—Banyuwangi, serta Serang—Panimbang dengan skema baru yaitu ketersediaan layanan atau availability payment. Sejumlah momentum baru di sektor jalan tol pun terjadi pada tahun ini, seperti elektronifikasi pembayaran di seluruh jalan tol di Indonesia, integrasi pembayaran antaroperator, dan juga penerbitan instrumen investasi baru sebagai pendanaan alternatif bagi jalan tol seperti sekuritisasi pendapatan dan obligasi proyek. Tak ketinggalan, pemerintah pun menyetujui hak badan usaha untuk mendapatkan penyesuaian tarif tol pada tahun ini. Ada 19 badan usaha jalan tol yang mengajukan penyesuaian tarif. Namun, hingga akhir Desember, pemerintah baru menyetujui kenaikan tarif untuk 9 ruas tol, 4 lainnya masih dalam evaluasi standar pelanan minimum (SPM), sedangkan jadwal penyesuaian tarif 6 ruas tol lainnya diundur hingga dinyatakan telah memenuhi SPM. (Deandra Syarizka)